

---

## Techno-Sociopreneurship Tourism Industry: Model Pengelolaan Daerah Tertinggal Menuju Daerah Maju dan Berdaya Saing

Muhammad Fajar Wahyudi Rahman\*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
Firza Oktavia Nurul Kumala, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

### **Abstract:**

*Based on data from the Village Community Empowerment Service East Java, Indonesia the districts/cities that still have underdeveloped villages include Lamongan Regency, which is recorded at most, namely 42 villages. From the semi-systematic literature review, three papers were selected as references in an example of a development model for an area. The author's recommendation as a role model for the management of underdeveloped areas is a combination of: community-based tourism approaches, website-based fundraising called "vitamin sea", and community entrepreneurial activities which the author calls the Techno-Sociopreneurship Tourism Industry. The author argues that by using the concept of an inclusive Techno-Sociopreneurship Tourism Industry; The area of the coastal tourism industry in Indonesia (especially Lamongan) is expected to transform into a new global economic order that has current economic independence. The authors also offer direction for future research in the area on the performance of the tourism industry in Indonesia.*

**Keywords:** East Java; Indonesia; Techno-Sociopreneurship; Tourism Industry

### **Abstrak:**

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Timur, Indonesia mengungkapkan kabupaten/kota yang masih memiliki desa tertinggal diantaranya ialah Kabupaten Lamongan tercatat paling banyak yaitu 42 desa. Dari kajian literatur secara semi-sistematis, tiga makalah dipilih sebagai rujukan dalam contoh model pengembangan suatu daerah. Rekomendasi penulis sebagai role model pengelolaan daerah tertinggal yaitu perpaduan antara: pendekatan pariwisata berbasis masyarakat, *fundraising* berbasis *website* yang bernama "vitamin sea", dan aktivitas kewirausahaan penduduk yang penulis sebut dengan Techno-Sociopreneurship Tourism Industry. Penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan konsep Techno-Sociopreneurship Tourism Industry yang inklusif; kawasan industry pariwisata wilayah pesisir di Indonesia (khususnya Lamongan) diharapkan dapat berubah menjadi tatanan ekonomi global baru yang memiliki kemandirian ekonomi saat ini. Penulis juga menawarkan arahan untuk penelitian masa depan di area tersebut pada kinerja industri pariwisata di Indonesia.

**Kata-kata kunci:** Jawa Timur; Indonesia; Techno-Sociopreneurship; Tourism Industry

\*Email Korespondensi: [muhammadfajar.19013@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadfajar.19013@mhs.unesa.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Terlaksananya pembangunan daerah di Jawa Timur, terkhusus wilayah pesisir pantai belum menyentuh aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dipelosok desa. Kesenjangan yang terjadi di desa dan kota penyebab awalnya adalah kerusakan dan bias

akan pembangunan yang lebih mengutamakan pada ekonomi perkotaan yang akhirnya menimbulkan ketertinggalan daerah miskin.

Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) "daerah" tertinggal, yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Sejak tahun 2019, daerah tersebut sudah tidak tercatat sebagai daerah tertinggal. Namun, masih ada tugas untuk Gubernur dalam mengentaskan desa tertinggal yang berjumlah 361 pada tahun 2020 (Yasin, 2019).

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang dinilai masih ada ketimpangan sosial di Provinsi Jawa Tmur. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Timur mengungkapkan kabupaten/kota yang masih memiliki desa tertinggal diantaranya ialah Kabupaten Lamongan tercatat paling banyak yaitu 42 desa. Disusul Pasuruan sebanyak 39 desa, Malang 24 desa, dan Gresik 22 desa (Jatimpos.id, 2020).

Fokus dari pertumbuhan ekonomi memiliki daerah penarikan dan penolakan hingga mencapai batasan tertentu sehingga membentuk wilayah luas berupa gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan melihat dampaknya masing-masing. Dalam teori ilmu ekonomi regional disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pembangunan suatu wilayah yang menarik karena memberikan efek positif kepada wilayah sekitar (Richardson, 2001). Efek atau dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi berupa efek tetesan kebawah (*spread effect*) dan efek polarisasi, pemasukan di wilayah tertentu akan mengalami peningkatan jika investasi pembangunan lebih terfokus kepada pusat pertumbuhan daripada disebarkan ke wilayah yang bersangkutan. Dalam hubungannya, satu cara yang harus digerakkan pemerintah yakni perumusan regulasi yang sistematis dan terarah (Syamsuar, 2010).

Apabila diamati pola pembangunan yang sudah diterapkan yaitu efek polarisasi seperti halnya adanya urbanisasi tenaga kerja di pedesaan, pusat industri hanya berada di perkotaan. Sedangkan *spread effect* yang diutamakan tidak terjadi, misalnya minat investor dalam berinvestasi di pedesaan untuk pengambilan bahan baku. Akibatnya daerah yang mengalami perkembangan akan semakin berkembang dengan penuhnya pengelolaan industri, dan sebaliknya daerah tertinggal kurang diminati investor (Syahza, 2007).

Syahza (2007), mengemukakan bahwa pendekatan yang harus diterapkan untuk pembangunan wilayah pedesaan yaitu dengan mengamati ciri dan sifatnya. Terdapat empat upaya untuk membangun pedesaan yang memiliki keterkaitan antara strategi pembangunan pemerintah, upaya tersebut yakni: *pertama*, pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, dalam hal ini memerlukan modal dan bimbingan dalam mendayagunakan teknologi untuk pemasaran, sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi; *kedua*, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa agar berdaya saing tinggi dan lebih produktif; *ketiga*, membangun dan menambah sarana prasarana di pedesaan yang memacu laju ketertinggalan masyarakat; *keempat*, meningkatkan kelembagaan yang bersifat formal

ataupun non-formal, yang dibutuhkan pedesaan adalah lembaga yang mampu mendorong perekonomian masyarakat contohnya lembaga keuangan.

Namun dari segi lain, sebab kesenjangan ekonomi menurut Alim (2007), menilai bahwa kebijakan dalam negeri lebih mengedepankan kepentingan pemodal industri kota dibanding rakyat desa. Di tingkatan pedesaan, pemerintah lebih mengimplementasikan regulasi yang banyak memberikan untung kepada kelompok elit daripada buruh tani. Misalnya adalah pembuatan proyek intensifikasi pertanian yang memberikan *output* berlimpah. Teknologi dan cara bertani dibuat modern, petani bisa panen dalam kurun waktu dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Tidak sedikit pula petani yang bisa berangkat haji, pakar ilmu biasa menyebut dengan istilah revolusi hijau. Dari paparan diatas peneliti berharap dapat menemukan model pengembangan wilayah tertinggal dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi desa di kabupaten yang memiliki ketertimpangan dan ketertinggalan di wilayah Jawa Timur.

Mengambil dari fenomena tersebut, artikel ini bertujuan mengambil perhatian khusus pada contoh model pengembangan suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini disusun sebagai berikut. Kami memulai diskusi kami dengan menjelaskan pendekatan dan kerangka penelitian kami. Ini diikuti dengan metodologi yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis tinjauan literatur. Bagian setelah ini akan menjelaskan temuan penelitian kami, bersama dengan diskusi dan kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Tinjauan literatur semi-sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi model pengelolaan daerah tertinggal menuju daerah maju dan berdaya saing, dengan mencari dan mengelompokkan literatur yang relevan secara sistematis. Tinjauan ini berfokus pada studi yang terkait dengan pengelolaan daerah tertinggal menuju daerah maju dan berdaya saing.

Dalam artikel ini, peneliti mencoba memberikan beberapa referensi model pengelolaan daerah tertinggal yang dianggap cukup efektif dan efisien serta terbukti membawa dampak yang baik pada suatu daerah. Akhirnya, peneliti mencoba untuk menciptakan role model yang dianggap sesuai dengan beberapa daerah yang dijadikan fenomena dalam penjelasan diatas sebelumnya.

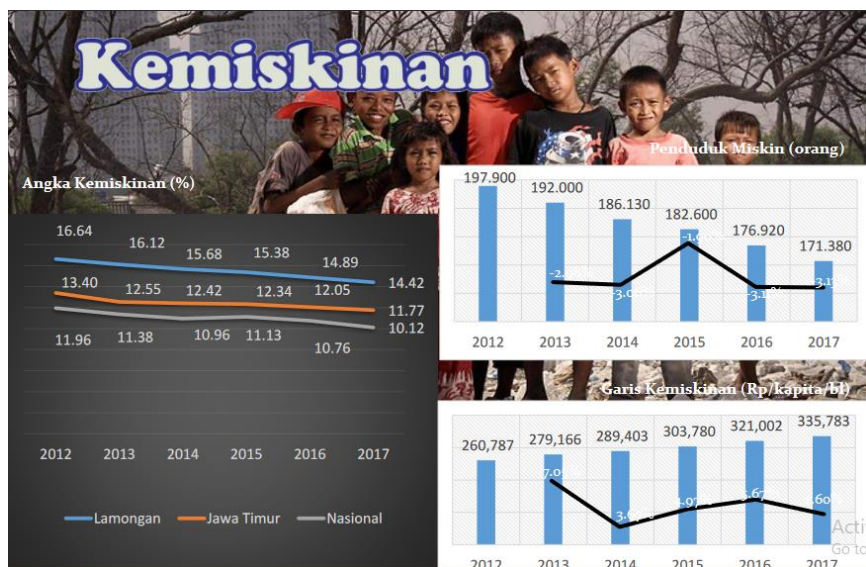
Artikel ini merujuk pada 3 literatur utama, yaitu studi yang dilakukan oleh (1) Singgalen et al., (2019) dengan judul “Community participation in regional tourism development: a case study in north halmahera regency – Indonesia”; (2) Tleuberdinova et al., (2019), dengan judul “Expert assessment of entrepreneurial activity development: a case study”; dan (3) Azizi et al., (2018), dengan judul “Fundraising berbasis website vitamin sea: program inovatif Pengeksploran dan promosi destinasi wisata bahari untuk mensukseskan pesona indonesia (wonderful Indonesia) dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Daerah dan Kondisi Penduduk di Kabupaten Lamongan

Luas Kabupaten Lamongan sekitar 1.812,8 km<sup>2</sup> atau 3,73% dari wilayah Jawa Timur. Dilihat secara administratif, Kabupaten Lamongan mempunyai 27 kecamatan yang mencakup 462 desa dan 12 kelurahan serta 1.431 dusun. Dalam rencana penyelenggaraan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten ini masuk pada wilayah Pengembangan Germa Kertosusila Plus. Dari letak geografisnya sangatlah strategis karena ada dijalur pantai utara yang menghubungkan antara kabupaten/kota di wilayah utara Jawa Timur serta berada dijalur arteri primer Surabaya-Lamongan-Tuban sampai pada Jawa Tengah dan jalan provinsi Mojokerto-Lamongan. Ibukota kabupaten memiliki jarak 44,8 km dari Ibu kota provinsi Surabaya.

Data yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (2017), tingkat kemiskinan di Lamongan sebesar 14,42%, diatas kemiskinan tingkat provinsi Jawa Timur, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional yaitu 10,12%. Tingginya kemiskinan Kabupaten Lamongan karena banyaknya daerah tertinggal. Perbandingan tersebut disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Bappeda Kabupaten Lamongan, (2017)

**Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional**

## Socio Tourism Industry

*Singgalen et al., (2019)*

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuatan warga negara. Partisipasi masyarakat dikelompokkan berdasarkan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan, dan implementasi hingga tahap evaluasi. Sementara itu, tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969) terdiri dari delapan tingkatan seperti: manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penempatan,

kemitraan, kekuasaan yang didelegasikan, dan kontrol warga negara. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana redistribusi kekuasaan antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima manfaat itu terjadi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah menunjukkan adanya kontrol masyarakat dalam perencanaan pariwisata, melaksanakan dan mengevaluasi program pengembangan. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pendekatan pariwisata berbasis masyarakat telah berhasil dilaksanakan dalam konteks Halmahera Utara, Indonesia. Tujuan dari penelitian yaitu mendeskripsikan partisipasi masyarakat untuk pengembangan pariwisata regional dari perspektif teori Arnstein melalui tangga partisipasi di Pantai Pitu sebagai Tujuan Wisata top Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia.

## **Entrepreneurship Tourism Industry**

*Tleuberdinova et al., (2019)*

Kewirausahaan telah lama menjadi elemen penting dari pembangunan ekonomi. Ada sejumlah studi empiris yang ditujukan untuk mendefinisikan konsep kewirausahaan dan menganalisis hubungan positif antara kegiatan bisnis dan indikator ekonomi. Pengusaha paling sering didefinisikan sebagai orang yang mencoba melakukan sesuatu yang baru, memvisualisasikan peluang bisnis, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan bisnis dan membawa risiko (mis. Schumpeter, 2007). Sebagai inovator, pengusaha memperkenalkan produk baru dan teknologi produksi ke pasar, mengeksplorasi pasar baru untuk produk yang sudah ada, mengembangkan strategi pemasaran baru, dll. (mis. Steyaert & Hjorth, 2003).

Kewirausahaan berkontribusi pada pembentukan modal dengan mengumpulkan tabungan dan investasi; memberikan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan daya beli penduduk, menciptakan kondisi untuk kemakmuran masyarakat; berkontribusi pada pembangunan regional yang seimbang di suatu negara; membantu mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan satu orang (mis. Bukhantseva, 2011). Penawaran konsumen pengusaha dalam bentuk barang dan jasa baru mengarah pada lapangan kerja baru, yang dapat menghasilkan efek berjenjang dalam perekonomian, berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional karena pendapatan pajak yang lebih tinggi, dan dapat digunakan untuk investasi di sektor lain dan modal manusia (Asaul, 2013).

Tujuan artikel ini adalah untuk mengintegrasikan secara teoritis faktor pengembangan bisnis yang paling signifikan di Kazakhstan dan menentukan tingkat aktivitas kewirausahaan. Survei pengusaha dan spesialis yang kegiatannya terkait dengan pembentukan kondisi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## **Techno Tourism Industry**

*Azizi et al., (2018)*

Kinerja pariwisata bahari Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga. Sektor pariwisata bahari Malaysia mampu menyumbang 40% terhadap pendapatan pariwisata,

sedangkan Indonesia hanya 15% (Noviendi, 2015). Buruknya kinerja pariwisata bahari. Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya aksesibilitas, variasi obyek wisata (*attractions*) terbatas, daya dukung dan kualitas lingkungan, masih kurangnya promosi tentang pariwisata bahari, dan yang terakhir adalah terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan pariwisata. Selain itu, banyak ancaman yang terjadi utamanya *illegal fishing* dan pengakuan daerah teritorial maritim oleh negara lain.

Kondisi tersebut mendorong terciptanya program inovatif pengentasan masalah pengembangan wisata bahari dan promosi daerah wisata bahari dalam bentuk *fundraising* berbasis *website* yang bernama "*Vitamin Sea*". Program ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberdayakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Serta, dapat meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Keunggulan tersebut dapat memaksimalkan pertumbuhan peningkatan usaha dibidang industri wisata bahari, meningkatkan masyarakat sadar wisata, dan mensukseskan program pemerintah yang bertajuk "Pesona Indonesia" dalam mencapai target wisatawan domestik dan pencapaian target 20 juta wisatawan mancanegara dalam tajuk "*Wonderful Indonesia*". Pemaksimalan program inovatif ini juga menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan solusi dalam mendapatkan donasi sebagai pendorong masyarakat untuk menciptakan citra positif daerah tujuan wisata bahari Indonesia serta membuka peluang untuk keterlibatan sektor lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Vitamin Sea* adalah sebuah platform dimana seseorang dapat mengumpulkan dan memberikan sumbangan untuk pengembangan pariwisata. Program inovatif ini juga mempromosikan program Pesona Indonesia dan *Wonderful Indonesia*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penggalangan dana berdasarkan situs web *Vitamin Sea* diharapkan dapat membantu masyarakat pesisir dalam memperoleh pendanaan alternatif untuk daerah potensi wisata bahari dan meningkatkan daya saing pariwisata bahari Indonesia.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan isi dari Bab 1 (Ketentuan Umum) dalam Undang – Undang RI nomer 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, maka dari itu sudah seharusnya pemerintah pusat, provinsi maupun daerah saling bergotong-royong serta memikirkan model yang terbaik mengenai mengelola daerah/desa tertinggal menuju daerah/desa maju dan berdaya saing.

Partisipasi masyarakat (manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penempatan, kemitraan, kekuasaan yang didelegasikan, dan kontrol warga negara) dalam pengembangan pariwisata daerah menunjukkan adanya kontrol masyarakat dalam perencanaan pariwisata, melaksanakan dan mengevaluasi program pengembangan. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pendekatan pariwisata berbasis masyarakat telah berhasil dilaksanakan dalam konteks Halmahera Utara, Indonesia.

Program inovatif pengentasan masalah pengembangan wisata bahari dan promosi daerah wisata bahari dalam bentuk *fundraising* berbasis *website* yang bernama “*Vitamin Sea*”. Program ini juga sangat membantu pemerintah untuk memberdayakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Serta, dapat meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Keunggulan tersebut dapat memaksimalkan pertumbuhan peningkatan usaha dibidang industri wisata bahari, meningkatkan masyarakat sadar wisata, dan mensukseskan program pemerintah yang bertajuk “Pesona Indonesia” dalam mencapai target wisatawan domestik dan pencapaian target 20 juta wisatawan mancanegara dalam tajuk “*Wonderful Indonesia*”. Pemaksimalan program inovatif ini juga menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Merangsang aktivitas kewirausahaan penduduk, berkontribusi pada pengembangan ekonomi negara melalui pembentukan barang dan jasa baru, serta pengembangan industri dan pasar baru. Faktor lingkungan bisnis yang paling signifikan adalah sebagai berikut: dukungan finansial; pendidikan dan pelatihan profesional; kerangka peraturan (termasuk peraturan perpajakan dan prosedur pendaftaran); iklim ekonomi; dan kecenderungan untuk berwirausaha. Faktor lingkungan bisnis yang paling tidak signifikan adalah intensitas persaingan; norma budaya dan sosial; perbedaan dalam fungsi usaha kecil, menengah dan besar; pengembangan R&D; dan internasionalisasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, penulis menyarankan agar pemerintah daerah dapat bekerjasama antar stakeholder dalam mengembangkan potensi daerahnya, khususnya industri pariwisata wilayah pesisir. Penulis menyarankan sebuah gagasan atau terobosan baru pada sektor industri pariwisata, yaitu: Techno-Sociopreneurship Tourism Industry. Berangkat dari konsep *Techno*: mendayagunakan IPTEK dengan kreasi dan inovasi (misal. *fundraising* berbasis *website* yang bernama “*Vitamin Sea*”) untuk ketahanan dan pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia. *Sociopreneurship*: menjunjung tinggi partisipasi masyarakat melalui rangsangan aktivitas kewirausahaan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35, 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Alim, Muhammad Kholikul. (2007). *Negara Vs. Kemiskinan di Pedesaan*. [http://uploadoverload.blogs.friendster.com/my\\_blog/2007/07/negara\\_vs\\_kemis.html](http://uploadoverload.blogs.friendster.com/my_blog/2007/07/negara_vs_kemis.html), 10 Agustus 2007.
- Asaul, A.N. (2013). *Organization of entrepreneurial activities*. Saint-Peterburg: St. Petersburg.

- Azizi, P. N., Mahardika, A., & Nuzul, A. (2018). Fundraising berbasis website vitamin sea: program inovatif pengeksporan dan promosi destinasi wisata bahari untuk mensukseskan pesona indonesia (wonderful indonesia) dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. *Value Journal of Management and Business*, 2(2), 302–311.
- Bukhantseva, S.N. (2011). *Activity of entrepreneurship is the basis for the development of small towns. In: Materials of the regional scientific and practical Internet conference*. Livny: LF FGOU HPE "State University-UNPK, 56-64.  
<https://lamongankab.go.id/bappeda/category/dokumen/hasil-hasil-pembangunan-kabupaten-lamongan/>  
<https://www.jatimpos.id/kabar/desa-tertinggal-di-jatim-lamongan-42-pasuruan-39-malang-24-b1XmD9cbk>
- Noviendi, Makalam. (2015). Presrelease Wondernesia Dorong Wisatawan Mancanegara Di Indonesia. [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id)
- Richardson. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit FE-UI.
- Schumpeter, J. (2007). *The theory of economic development*. Moscow: Progress.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019). Community Participation In Regional Tourism Development: A Case Study In North Halmahera Regency - Indonesia. *Insight Into Regional Development*, 1(4), 318–333.
- Steyaert, C. & Hjorth, D. (2003). *New movements in entrepreneurship*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Syahza, Almasdi. (2007a). Model pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan berbasis agribisnis di daerah riau. *Penelitian Fundamental DP2M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Syahza, Almasdi., (2007b). Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Syamsuar. (2010). Harapan masyarakat kabupaten kepulauan meranti dalam mewujudkan otonomi daerah. *Makalah pada seminar: Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Riau, Pekanbaru: Balitbangda Provinsi.
- Tleuberdinova, A., Shayekina, Z., Salauatova, D., Amerkhanova, A., & Ramashova, A. (2019). Expert Assessment Of Entrepreneurial Activity Development: A Case Study. *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 7(2), 1599–1612.
- UURI. (2014). *Undang – Undang R1 nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa Bab 1 Pasal 1 ayat 8*. Presiden RI: Jakarta, Indonesia.